

## Terbelit Penyelewengan Dana Desa, Kepala Desa Belandean Muara Barito Kuala Ditahan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/mdf-28-kades-Belandean-muara-tersangka-penyelewengan-anggaran-dana-desa.jpg>

Pasca ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan Anggaran Dana Desa pada 3 Desember 2021, Kepala Desa (Kades) Belandean Muara akhirnya ditahan di Rutan Marabahan, Kamis (10/3/2022). Sebelumnya, meski ditetapkan sebagai tersangka sekitar tiga bulan yang lalu, Kades berinisial MF (28) tidak ditahan karena dianggap kooperatif menjalani penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola.

Disampaikan Kejari Barito Kuala, Eben Nesor Silalahi, melalui Kasi Intel M. Hamidun Noor, MDF ditempatkan di Rutan Kelas IIB Marabahan. Setelah tim penyidik dari Bidang Pidana Khusus menyelesaikan tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Belandean Muara, Kecamatan Alalak. “Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin,” imbuhnya.

Sebagai Kades Belandean Muara, MF sebelumnya diharuskan mengelola dan bertanggung jawab atas Anggaran Dana Desa 2020 sebesar Rp 1.063.557.100. Namun dalam pengelolaannya, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. “Usai pemeriksaan, ada sekitar Rp 191.813.407 kerugian negara yang disebabkan penyelewengan MDF,” terang Hamidun.

Tersangka pun dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 subsidiair, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sepanjang ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan terakhir, MF juga masih aktif bertugas sebagai Kades Belandean. Hal ini karena dinilai kooperatif dalam menjalani penyidikan, ia juga berupaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 30 juta.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa tersangka sempat tidak ditahan karena dinilai kooperatif, namun Kades Belandean Muara tersebut sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa dan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Batola. Ia dititipkan di Rutan kelas IIB Marabahan

Tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama MF, Kades Belandean Muara kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain penyerahan berkas, Kasi Intel Kejari Batola M. Hamidun Noor mengungkapkan, tersangka MF yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Belandean Muara Tahun Anggaran 2020 juga sudah menjadi tahanan kejaksaan selama 20 hari terhitung sejak 10 Maret. “Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti ini, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,” ujarnya.

Kasus ini terkait dengan dana desa pada APBDes Desa Belandean Muara sejumlah Rp Rp 1.063.557.100. Dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. “Atas temuan itu, kepala desa sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Nomor: 700/119/LHP.RIKSUS/Irban Tanggal 3 Oktober 2021, yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp 191. 813.407,” pungkasnya.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/11/korupsi-di-kalsel-terbelit-penyelewengan-dana-desa-kades-Belandean-muara-batola-ditahan>, Terbelit Penyelewengan Dana Desa, Kades Belandean Muara Barito Kuala Ditahan, (11/03/22)
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/88189/korupsi-dana-desa-kades-belandean-muara-ditahan/>, Korupsi Dana Desa, Kades Belandean Muara Ditahan, (11/03/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.